

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Sumardjono, Maria S.W., Dkk., 2014, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Fakultas Hukum UGM dan Gadjah Mada Press, Yogyakarta._____
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah: Metodologi Pnelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Abdullah, Irwan, 2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad, Amirruddin, 2001, "Peran Serta Masyarakat di Kawasan Pesisir", dalam *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Akib, Muhammad, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Arba, 2018, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penata Gunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ayatrohaedi, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Geriya, I Wayan, 2007, *Konsep dan Strategi Revitalisasi Kearifan Lokal*, UPT Penerbit Universitas Udayana, Denpasar.
- Hadjon, Philipus, M, 2010, *Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Dalam Buku Hukum Administrasi Dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta..
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rahmi dan As'Adi, Edi, 2019, *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan*, Rajawali Pers, Depok.

- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi: Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- J., Malinckrodt, 1974. *Het Adatrecht van Borneo*. Leiden: Dubbeldeman.
- Juniarso dan Achmad Sodik, 2008 *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Kurniawan, Robert, 2017, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal; Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Calpulis, Yogyakarta.
- L.Tanya, Benard. 2011, *Hukum dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Marbun, SF. dan Mahfud, Moh, MD, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marfai, Muh. Aris, 2012, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Gajah University Press.
- Mariane, Irene, 2014, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta..
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Prayanto, Ujianto Singgih, 2013, *Kontekstualisasi Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafiak, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soja, Edward, 2010, *Seeking spatial justice*, Minnneapolis, University of minnesota Press.
- Suja, Wayan, 2010, *Kearifan Lokal Sains Asli Bali*, Paramita, Surabaya.
- Sumardjono, Maria S.W., 2018, *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta.

Suryabrata, Sumadi, 1987, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm.93.

U, Lontaan, J., 1975, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Jakarta, Bumi Restu.

Wardana, Agung, 2009, *Contemporary Bali: Contested Space and Governance*, Palgrave Macmillan, Singapore.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2031.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan, Hemaq Beniung, Hutan Adat Kekao dan Hemaq Pasoq Sebagai Hutan Adat.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelestarian Adat Guguh Taotn.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.

Karya Ilmiah, Jurnal dan Surat Kabar:

Anonim, dokumen yang dihasilkan oleh United Nation Confrence on Environment and Development (UNCED).

Anonim, “Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Kampung Muara Tae Mendapatkan Penghargaan Equator Prize”, <http://fwi.or.id/publikasi/masyarakat-adat-dayak-benuaq-di-kampung-muara-tae-mendapatkan-penghargaan-equator-prize/>, diakses tanggal 18 Agustus 2020.

Anonim, “Silangsengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan. Studi Kasus Tumpang Tindih di Muara Tae dan Muara Lambakan Kalimantan Timur”, http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/10/silang_sengkarut_sml.pdf, diakses tanggal 20 Agustus 2020.

AM., Yunus Wahid, 2010, “Paradigma dan Instrumen Yuridis dalam Penegakan Hukum Lingkungan”, *Orasi Ilmiah*, Fakultas Hukum Unhas Makassar, Tanggal 2 Agustus 2010, Hasanuddin University Press Makassar.

Amalia, Rizky, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 27, No. 3, 2012.

Arba, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol II, Nomor 4, 2014.

Arba, H. M., “Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UUPPR dan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20, No. 2, Desember 2013.

Artaya, “Perda Nomor 3/2020 RTRW Bali Pedoman Penataan Ruang Pembangunan Pulau Dewata”, <https://atnews.id/portal/news/4926>, diakses tanggal 18 Agustus 2020.

Astika, Ariya Diani, 2016, “Kajian Pengelolaan Lingkungan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Provinsi Jawa Barat”, *Tesis Magister Ilmu Lingkungan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Diakses dari http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=99658&obyek_id=4.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, Kutai Barat Dalam Angka 2011, BPS Kab. Kubar, ISSN: 1907-2112, 2011.

Budiyanto, 2016, “Model Fungsionalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Dalam Kebijakan Hukum (Legal Policy) Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (Kajian Konstitusional Penguatan Komunitas Adat Sedulur Sikep Pati Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup)”, *Desertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 142. Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/5587/>.

Buku Profil Daerah Kab. Kutai Barat Tahun 2019.

Data Kompilasi Forest Watch Indonesia 2016.

Efendi, A'an, “Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *ejournal.unisbablitar.ac.id*, diakses tanggal 15 Desember 2019.

Firmansyah, Nurul, 2017, “Aturan Perlindungan Kearifan Lokal Belum Sepenuhnya Melindungi”, <https://www.mongabay.co.id/2017/07/22/opini-aturan-perlindungan-kearifan-lokal-belum-sepenuhnya-melindungi/>, diakses tanggal 20 Mei 2020.

Haba, John, 2007, “Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso”, *ICIP dan Eropean Commision*, Jakarta.

Hasil Pemetaan Partisipatif FWI dan Kaoem Telapak, 2017.

Imran, Suwitno Y., “Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, September 2013.

Koentjaraningrat, 1984, *Kamus Istilah Anthropologi*, Jakarta: Pusat dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.

- Kristiyanto, Eko Noer, “Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah (Local Wisdom Position And Role Of Society In Spatial Planning In The Region)”, *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017.
- BP3D Kabupaten Kutai Barat Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Pu/Cipta Karya 2016 – 2021, Kutai Barat 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, Kutai Barat dalam angka Tahun 2019.
- Laporan akhir tim pengkaji konstitusi tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia, Jakarta, 2014, *bphn.go.id*.
- Laporan Hasil Penelitian, 2016, *Pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia*. Forest Watch Indonesia.
- Lisdiyono, Edy, 2008, “Legislasi Penataan Ruang Studi tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Kota Semarang Dalam Regulasi Daerah di Kota Semarang”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lubis, Zulkifli B., “Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 29, No. 3, 2005.
- Maryanto, Wilis dan Lisyawati Nurcahyani, 2010, *Hukum adat Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Klimantan Timur : tata cara adat dalam penyelesaian perkara*, Pontianak: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak.
- Muhaimin, “Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali (Position Of Local Wisdom In Spatial Layout Of The Province Of Bali)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, 2018.
- Muhaimin, “Position Of Local Wisdom In Spatial Layout Of The Province Of Bali”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2016.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2011, “Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi atas Nama NKRI”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor 3.

- Mukhlis, 2010, “Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2.
- Prabandi, Hendra Wahanu, “Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal”, *Ejurnal Jdih.Bapenas*, Edisi 01, 2011.
- Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 diakses melalui <http://bappenas.go.id/files/3413/5185/1850/rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-tahun-2015-20025.doc>
- Riyadi, Dedi M. Masykur, “Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah”, Makalah yang disampaikan pada acara Diseminasi dan Diskusi Program pengembangan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah, diakses melalui https://www.bappenas.go.id/files/2913/5228/1449/bangda-bangwill_20091008103033_2165_1.pdf, tanggal 28 Maret 2020.
- Saiman, Darius, dkk., “Sengketa Informasi Kanwil BPN Kaltim dengan Masyarakat Adat Muara Tae yang Berlarut Tanpa Kejelasan”, <http://fwi.or.id/publikasi/senketa-informasi-kanwil-bpn-kaltim-dengan-masyarakat-adat-muara-tae-kian-berlarut-tanpa-kejelasan/>, diakses tanggal 21 Juli 2020.
- Sartini, “Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati”, *Jurnal Filsafat*, Jilid 37, Nomor 2, Agustus, 2004.
- Sembring, Boy Jerry Even, Dkk, 2019, *Temuan Awal Riset (Preliminary Finding) “Ekonomi Nusantara Jalan Jitu Pemulihan Lingkungan Hidup dan Daulat Rakyat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia”*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Sukmadewi, Ni Wayan Rai dan I Made Subawa, “Eksistensi Yuridis Kearifan Lokal dalam Peraturan Perundang-Undangan”, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/38211/23176>.
- Sukma, Sony, “Model-Model Kajian Ekokritik Sastra”, <https://fib.ub.ac.id/wp-content/uploads/I-MODEL-KAJIAN-KEARIFAN-LINGKUNGAN-DALAM-SASTRA.pdf>, diakses tanggal 18 Agustus 2020.
- Telapak, “Our Forest Our Lives The Story of Muara Tae”. http://kaoemtelapak.org/wp-content/uploads/2011/11/Hutan-kami-hidup-kami_Muara_Tae-1.pdf,

Wardana, Agung, "Alliances and Contestations in the Legal Production of Space: The Case of Bali," *Asian Journal of Comparative Law*, Volume 9, Nomor 1, 2014.

Wardana, Agung, Legal Engineering in a Contest Over Space in Bali, *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 19, No. 1, 2018.

Wardana, Agung, Webinar Telaah UU Minerba yang diselenggarakan oleh (PKPSH) 2020, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=HkEOh103mZ8>.

Wahid, A.M. Yunus, "Tata Ruang Sebagai Instrumen Yuridis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal CLAVIA*, Vol. 12, No. 2, Juni 2011.

Yovanda, "Masyarakat Kalimantan Timur Menderita Akibat Lingkungan yang Rusak", <https://www.mongabay.co.id/2017/03/27/masyarakat-kalimantan-timur-menderita-akibat-lingkungan-yang-rusak/>.

Wawancara:

Petrus Asuy, Tokoh Adat Masyarakat Dayak Benuaq-Mauara Tae, 19 Desember 2019.

Petrus Asuy dan Radius Perwakilan NGO AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), 20 Januari 2020.

Haris Retno, Dosen Hukum Adat, Universitas Mulawarman, 22 Januari 2020.

Yohana Tiko, Direktur WALHI Kalimantan Timur, 19 Januari 2020.

Radius, Perwakilan AMAN Kalimantan Timur, 20 Januari 2020.

Munar, Perwakilan masyarakat Dayak Benuaq-Muara Tae, 19 Desember 2020.